

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha ternak sapi potong merupakan usaha masyarakat yang saat ini tengah mendapatkan perhatian besar dari pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Hal ini sangat beralasan karena selain daging sapi yang bagi sebagian besar masyarakat dianggap sebagai sumber kebutuhan pokok juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan bagi peternak sapi potong yang pada umumnya dari kalangan masyarakat kelas menengah kebawah.

Berdasarkan *Pres Release* Konferensi Pers Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2012, kebutuhan daging sapi dan kerbau hingga akhir tahun 2012 mencapai 484 ribu ton, sedangkan ketersediaannya sebanyak 399 ribu ton (82,52%) dicukupi dari sapi lokal, sehingga terdapat kekurangan penyediaan sebesar 85 ribu ton (17,5%). Kekurangan ini dipenuhi dari impor berupa sapi bakalan dan daging yaitu sapi bakalan sebanyak 283 ribu ekor (setara dengan daging 51 ribu ton) dan impor daging beku sebanyak 34 ribu ton.

Walaupun persediaan sapi potong nasional tergolong rendah, namun dalam kenyataannya harga sapi potong dipasaran (termasuk harga daging sapi madura) juga masih tergolong murah. Hal ini diperparah dengan keputusan pemerintah yang menambahkan jumlah impor sapi potong dengan jumlah hampir dua kali lipat, yakni 12.500 ekor dari jumlah impor sapi sebelumnya 6.000 ekor (kemendag.go.id). Penambahan jumlah impor tersebut tentu berdampak pada harga jual sapi ditingkat peternak yang menjadi turun.

Guna keluar dari permasalahan tersebut maka perlu adanya upaya yang sistematis dalam mendorong pertumbuhan populasi sapi potong agar bisa meningkatkan produksi daging secara nasional. Pada umumnya keberhasilan suatu usaha peternakan ditentukan oleh tiga faktor yaitu bibit (*breeding*), pakan (*feeding*), dan manajemen yang baik. Bibit sapi yang berkualitas bagus akan menjadikan sapi tumbuh lebih cepat dan menghasilkan produk yang lebih optimal. Selain itu manajemen pemeliharaan yang tepat juga akan mendukung keberhasilan suatu usaha (Syafrial *et al.*, 2007).

Program pemerintah yang mencanangkan swasembada daging tahun 2014, yakni dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 19/Permentan/OT.140/2/2010 adalah salah satu upaya agar Indonesia tidak bergantung dengan

sapi potong impor. Adapun upaya tersebut antara lain dengan merevitalisasi program pembibitan melalui pendistribusian bibit sapi potong ke beberapa daerah yang memiliki potensi dengan harapan bisa meningkatkan populasi sapi hingga lebih dari 7% per tahun. Sampai saat ini program swasembada daging sapi ini tidak begitu tampak dan hanya sebatas program saja yang tidak begitu diurus.

Di Pulau Madura, sejak diresmikannya Jembatan Suramadu yang menghubungkan Kota Surabaya dengan Kabupaten Bangkalan, distribusi sapi potong semakin memudahkan distributor dan peternak untuk menjual hasil ternak ke beberapa wilayah di Pulau Jawa, mulai Jawa Timur hingga Jakarta dan Jawa Barat, dan sebagian sudah menembus Pulau Sumatera dan Kalimantan.

Jumlah produksi sapi di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2013 mencapai 205.009 ekor. Jumlah ternak sapi tersebut cenderung naik jika dibandingkan dengan tahun 2012 yang hanya mencapai 200.409. Naiknya jumlah produksi sapi tersebut dinilai karena meningkatnya jumlah populasi sapi potong yang berada di daerah Kabupaten Bangkalan. (Badan Pusat Statistik. 2013).

Kenaikan jumlah ternak sapi ini merupakan sesuatu yang sangat positif karena akan membantu program pemerintah pusat yang mencanangkan swasembada daging sapi pada tahun 2014, namun kenaikan ini akan menjadi percuma apabila kesejahteraan para peternak sapi Madura masih belum dipikirkan oleh pemerintah. Selain itu dari sisi peternak juga harus dilakukan pembenahan, baik dari segi struktur (*structure*) maupun perilakunya (*conduct*). Interaksi antara *structure* dan *conduct* inilah yang nantinya bisa menentukan bagaimana kinerja (*performance*) dari peternak sapi Madura bisa ditentukan.

Apabila diamati dari strukturnya (*structure*), permasalahan yang ada pada peternak sapi potong di Madura salah satunya adalah sulitnya para peternak untuk bisa menentukan harga yang diinginkan. Pada umumnya sapi akan dijual kepada blantik (pengepul sapi potong) yang tentu saja harus melalui proses tawar-menawar yang cukup rumit. Pada posisi ini peternak tidak bisa secara langsung menentukan berapa kisaran harga yang harus ditawarkan karena yang lebih dahulu memberikan harga adalah dari blantik. Peternak dalam hal ini tidak bisa menentukan harga jualnya karena posisi tawar (*bargaining position*) dari peternak masih dibawah blantik sehingga dengan harga berapa pun seorang peternak harus menerima harga jual yang diberikan.

Dilihat dari permasalahan awal perilaku (*Conduct*) pada peternak, hampir semua peternak sapi potong rumahan di Indonesia terutama di Pulau Madura merasa tidak pernah merugi dengan usaha ternak yang mereka jalankan (kecuali karena mati atau dicuri), namun demikian mereka merasa bahwa usaha ternak tersebut tidak bisa membawa kesejahteraan bagi keluarga dan masyarakat. Hal ini terjadi karena hampir seluruh peternak tidak pernah merinci berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara sapi-sapi mereka, seperti biaya tenaga kerja, biaya pakan, biaya perawatan dan lain-lainnya sehingga mereka tidak bisa mengetahui secara detail apakah usaha sapi potong tersebut masih diatas BEP (*Break Event Point*) atau justru malah dibawah BEP.

Kinerja (*Performance*) para peternak sapi di Madura masih cenderung pada level tradisional, baik dari segi perawatannya maupun dari segi pemasaran. Umumnya peternak sapi hanya mengandalkan sumberdaya yang ada disekitarnya tanpa memberi obat-obatan pendukung untuk meningkatkan kualitas dan harga jual sapi sehingga pada saat penjualan tidak ada peningkatan harga jual sapi yang didapatkan oleh peternak.

Permasalahan-permasalahan diatas adalah sedikit dari berbagai yang dihadapi oleh peternak sapi potong di wilayah Madura , terutama di Kabupaten Bangkalan, dan sehingga sudah selayak permasalahan tersebut seharusnya diteliti dan diatasi. Dari pemaparan permasalahan diatas peneliti akan mengajukan penelitian yang berjudul: “Analisis *Structure Conduct Performance* Usaha Sapi Madura (Studi Kasus di Kabupaten Bangkalan)”

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Menganalisa struktur usaha sapi potong madura di Kabupaten Bangkalan.
2. Menganalisa perilaku dari usaha sapi potong madura dan dampak yang ditimbulkan.
3. Menganalisa kinerja usaha sapi potong madura di Kabupaten Bangkalan.

1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan bisa menjadi sebuah masukan bagi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dalam menetapkan kebijakan mengenai sapi potong, khususnya sapi madura.
2. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan bisa menjadi memperkaya pengetahuan terutama yang berkaitan dengan sapi madura.
4. Bagi peneliti yang lain, penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dan tambahan informasi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan.